



KPU

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMNASMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 20 Januari 2017

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

AMNASMEN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100%

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	6.038.058.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10.000.000
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	363.202.000

Padang, Januari 2017

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN

**RENCANA AKSI KINERJA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA	KETERANGAN
				T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	Monitoring dan Supervisi Program dan Kegiatan KPU					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20 %	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
Tertaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95 %	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86 %	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Analisis Capaian Kinerja					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
	Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	

Padang, 20 Januari 2017

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN